

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN GAMPONG (Studi kasus: Program
Model Gampong Sehat Di Gampong Lamgugop
Kota Banda Aceh)**



Disusun Oleh :

DARMAN SURI

NIM. 170801049

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darman Suri
NIM : 170801049
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pembangunan Kesehatan Gampong (Studi kasus: Program Model Gampong Sehat Di Gampong Langugop Kota Banda Aceh)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2023
Yang menyatakan,


Darman Suri

**“KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN GAMPONG (Studi kasus: Program
Model Gampong Sehat Di Gampong Lamgugop
Kota Banda Aceh)”**

SKRIPSI

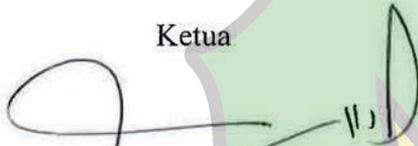
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023 M

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



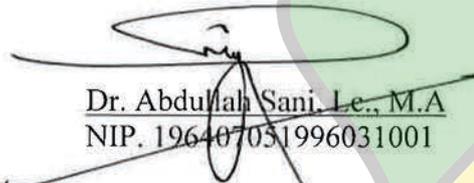
Dr. Ade Irma, B.H.Sc, M.A.
NIP. 197309212000032004

Sekretaris



Ramzi Murziqin, M.A.
NIP. 198605132019031006

Penguji I



Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A
NIP. 196407051996031001

Penguji II



Danil Akbar Tagwadin, B.IAM., M.Sc
NIDN. 2008048903

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

**“KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN GAMPONG (Studi kasus: Program
Model Gampong Sehat Di Gampong Lamgugop
Kota Banda Aceh)”**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal

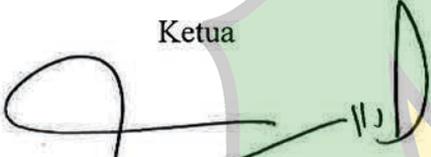
: Rabu, 26 Juli 2023 M

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

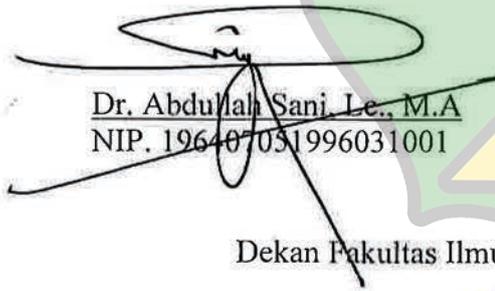
Sekretaris


Dr. Ade Irma, B.H.Sc, M.A.
NIP. 197309212000032004


Ramzi Murziqin, M.A.
NIP. 198605132019031006

Penguji I

Penguji II


Dr. Abdullah Sani, Le., M.A
NIP. 196407051996031001


Danil Akbar Tagwadin, B.IAM., M.Sc
NIDN. 2008048903

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh.




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian Ini Berjudul Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pembangunan Kesehatan Gampong (Studi Kasus: Program Model Gampong Sehat Di Gampong Lamgugop Kota Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan inovasi program model gampong Sehat di Gampong Lamgugop dan untuk Mengetahui tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan model gampong sehat di Lamgugop. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Program Model Gampong Sehat merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi kabupaten atau kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dapat dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Ada beberapa strategi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembangunan Kesehatan Gampong dalam penerapan model gampong sehat seperti strategi persiapan dalam mengumpulkan data informasi tentang model gampong sehat sehingga dengan strategi tersebut bisa mengetahui model kebijakan yang terjadi permasalahan dilapangan guna menerapkan digampong serta kesiapan gampong tersebut dalam bentuk apapun perlu dilakukan apabila gampong tersebut terpilih sebagai gampong pembinaan dalam melaksanakan program model gampong sehat dan peran pemangku kepentingan dan masyarakat faktor terpenting dalam menyuksekankan kebijakan MGS ini. Sedangkan Kendala saat ini yang dialami oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menwujudkan program MGS khususnya di Gampong Lamgugop, di sebabkan oleh banyaknya masyarakat/warga baru yang datang dari luar Kota Banda Aceh untuk menetap di Gampong tersebut yang secara tidak langsung dapat menyebabkan tidak temealisasinya indikator dari MGS. Sebagai contoh, banyak masyarakat yang datang dari luar Kota Banda Aceh yang masih belum mengetahui tentang aturan yang berlaku di Lamgugop Kota Banda Aceh, itu semua bisa dilihat banyaknya masyarakat luar Kota banda Aceh yang masih membakar sampah di pekarangan rumah, meludah sembarangan sangat mengendara, membuang sampah tidak pada tempatnya. Penghambat lainnya dalam Implementasi Kebijakan Model Gampong Sehat di Gampong Lamgugop seperti sarana dan prasarana pendukung program tersebut yang masih belum dimanfaatkan dengan baik, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpatrisipasi pada program misalnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, kemudian dari segi pelaksana sendiri yaitu sosialisasi yang kurang menyeluruh ataupun menyentuh masyarakat karena sosialisasi yang dilaksanakan juga belum intensif dan hanya daerah daerah tertentu.

Kata Kunci: *Gampong Sehat, Gampong Lamgugop, Kota Banda Aceh*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN COVER | |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1. Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| 2.2. Landasan Teori | 15 |
| 2.2.1 Kebijakan Publik | 15 |
| 2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik..... | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 29 |
| 3.1. Pendekatan Penelitian..... | 29 |
| 3.2. Fokus Penelitian | 29 |
| 3.3. Lokasi Penelitian | 29 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data | 30 |
| 3.5. Informan Penelitian | 30 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data | 33 |
| BAB IV HAIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 35 |
| 4.1. Profil Gampong Lamgugop Kota Banda Aceh..... | 35 |
| 4.2. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penerapan Inovasi Program Model Gampong Sehat Di Gampong Lamgugop | 43 |
| 4.3. Tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penerapan Inovasi Program Model Gampong Sehat Di Lamgugop..... | 55 |
| BAB V PENUTUP..... | 59 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 59 |
| 5.2. Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal maka pembangunan kesehatan adalah upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Agar mencapai hal tersebut, dapat melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Bidang kesehatan sebagai pendekatan yang dianggap paling tepat saat ini. Terkait hal tersebut pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005 dan No. 1138/Menkes/PB/VII/2005 menetapkan pedoman penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Kota sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk. Penyelenggaraannya dicapai melalui penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk mencapai kota sehat maka harus di mulai dari pembangunan gampong sehat di mana yang nantinya akan menciptakan kota sehat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pembangunan sehat di gampong-gampong sebagai pemenuhan hak masyarakat secara menyeluruh.

Kemudian dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sesuai Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pembangunan kesehatan

diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat berwujud. Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada menyebutkan bahwa: “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”. Sehingga kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila.

Pada dasarnya pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan terwujudnya perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, pengutamaan dan manfaat. Pemerintah Kota Banda Aceh dalam kepemimpinan saat ini menciptakan misi pada urutan keempat “Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat”. Dengan ini hasil suatu proses arah pembangunan sektor kesehatan di Kota Banda Aceh menurut visi secara umum adalah menciptakan “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah” diterjemahkan misi urutan keempat dinas kesehatan Kota Banda Aceh sebagai penanggung jawab sektor melakukan upaya melahirkan program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan

yang menyeluruh dengan menciptakan “Gampong Sehat, Banda Aceh Sehat” sehingga merupakan wujud nyata dari visi-misi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Untuk mewujudkan visi dan misi maka tujuan pembangunan kesehatan Kota Banda Aceh disusun berdasarkan kebutuhan kesehatan masyarakat yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Tujuan merupakan sesuatu yang harus dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan.¹ Namun dari kenyataannya bila dilihat permasalahan kesehatan di Kota Banda Aceh yang dipaparkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh kurangnya perilaku masyarakat, lingkungan, regulasi serta sistem data informasi pelayanan kesehatan yang telah diterima oleh pihak pemerintah ternyata terdapat beberapa hal yang dirasakan masih dikatakan belum mencapai optimal dalam pelayanan lebih baik dijalankan selama ini. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam berita menyebutkan bahwa: “kesehatan warga sangat dipengaruhi faktor lingkungan 40%, perilaku 35%, faktor layanan kesehatan 20%, dan faktor genetik 5%. Sehingga dalam proses meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, masih kurangnya pemahaman kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, dan lingkungan sehat, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan.”²

Pemerintah sebagai salah satu pelaku serta menjalankan regulasi demi menjamin kehidupan masyarakatnya khususnya disektor kesehatan apalagi

¹ Dok.RenStra dinkes Kota Banda Aceh 2017-2022, hlm 15

²<https://www.gatra.com/detail/news/454524/gaya%20hidup/2020-semua-desa-sudah-ikut-lomba-gampong-sehat-gemilang#> diakses pada tanggal 10 Januari 2023

masalah kesehatan perlu ditanggapi serius karena berpotensi hal yang tidak kita inginkan mengenai hak hidup seseorang, maka dengan ini pemerintah kota Banda Aceh melalui Dinas Kesehatan dengan programnya “Gampong Sehat, Banda Aceh Sehat”. Model Gampong Sehat di Kota Banda Aceh merupakan program yang digagas oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui peningkatan peran Kelompok Kerja Posyandu.

Gampong bagi masyarakat Aceh dapat diartikan sebagai kampung atau desa. Aparatur gampong terdiri dari kepala gampong (Keuchik) dan Dewan Penasehat gampong (Tuha Peut). Sebelum dicanangkannya program ini, Kota Banda Aceh yang memiliki 90 gampong, hanya 51 gampong yang sudah terbentuk desa siaga, akan tetapi masih 3 gampong yang dapat dikategorikan dalam gampong siaga aktif dengan strata purnama yaitu gampong Mibo, gampong Ceurih dan gampong Ateuk Pahlawan³. Model Gampong Sehat (MGS) mengadopsi konsep Desa Siaga dari Kementerian Kesehatan yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi gampong di Kota Banda Aceh, sehingga wujud MGS yang diharapkan adalah gampong yang masyarakatnya sadar, peduli dan melakukan secara kontinu upaya-upaya preventif kesehatan. Manfaat gampong sehat ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di gampong melalui perubahan perilaku sehingga terhindar dari penyakit menular seperti Demam Berdarah, menurunkan angka kesakitan PTM (Penyakit Tidak Menular), kasus gizi buruk dan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB). Salah satu gampong yang ikut melaksanakan program model gampong sehat ini ialah Gampong Lamgugop Kota Banda Aceh. Gampong ini

³ <http://inovasi.lan.go.id>. diakses pada tanggal 10 Januari 2023

berkomitmen ingin membangun gampong yang sehat untuk masyarakatnya. Saat ini pemerintah desa sudah melakukan beberapa upaya seperti melakukan aksi jaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan sehat.

Pada saat ini Gampong Lamgugop Kota Banda Aceh dengan berpenduduk 5.137 jiwa yang berada kawasan di Pusat Kota di mana gampong ini salah satu pusat perdagangan di Kota Banda Aceh kawasan pemukiman elite. Namun berdasarkan observasi lapangan peneliti menemukan masih terdapat kawasan kumuh untuk saat ini belum terkena dampak dalam pembinaan MGS. Maka dengan itu perlu ada pembinaan MGS di wilayah tersebut, mengingat wilayah Lamgugop banyak terdapat pemukiman kumuh yang dapat menimbulkan gejala dampak buruk kesehatan seperti demam berdarah, saat setelah hujan banyak genangan air tertinggal, dan amburadul dalam pengelolaan sampah yang mengakibatkan memunculkan penyakit. Apabila dengan adanya MGS ini maka dalam pengananan dampak buruk kesehatan di anstisipasi ditempat umum maka proses pengelolaan model gampong sehat bisa terwujud.

Saat ini Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk 249.499 ribu jiwa dengan motto kota Gemilang sehingga untuk mencapai menuju kota gemilang, dibutuhkan generasi yang tidak hanya memahami nilai agama dan pengetahuan dalam berbagai aspek khususnya pada bagian kesehatan. Salah satu ciri kota gemilang adalah warganya terjamin pendidikan dan kesehatan. Argumen awal peneliti melihat bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh kepemimpinan periode 2017-2022 saat ini masih belum tuntas membangun gampong sehat yang dilihat berdasarkan permasalahan di atas di mana salah satu gampong di Banda Aceh masih

belum mendapat pembinaan MSG. Oleh karena itu menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang **“Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pembangunan Kesehatan Gampong Studi kasus: Program Model Gampong Sehat Di Gampong Lamgugop Kota Banda Aceh)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merumuskan 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan inovasi program model gampong Sehat di Gampong Lamgugop ?
2. Apa saja tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan model gamong sehat di Lamgugop ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan inovasi program model gampong Sehat di Gampong Lamgugop
2. Untuk mengetahui tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan model gamong sehat di Lamgugop

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Model Gampong Sehat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Firman Ilmi, Dahlan Dahlan dengan judul Kebijakan Pemerintah Banda Aceh Dalam Pembangunan Kesehatan Desa dalam penelitian ini menjelaskan Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan menciptakan model Kota Madani ciri dari kota madani adalah warganya terjamin secara pendidikan dan kesehatan sehingga segala kebutuhan yang dilakukan saat penanganan kesehatan harus dilayani dengan baik. Kebijakan kesehatan model gampong sehat sangat diperlukan dalam pembangunan kesehatan masyarakat ditingkat gampong hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan seperti lingkungan, perilaku, faktor layanan kesehatan, dan faktor genetik. penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari Dinas Kesehatan kota Banda Aceh dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang undangan dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model kebijakan gampong sehat terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi kesehatan masyarakat yakni kurangnya pemahaman dalam menjaga kesehatan dilingkungannya, Hal ini disebabkan karena kurangnya perilaku masyarakat dalam membangun hidup sehat. pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kesehatan serta membuat regulasi gampong tentang kesehatan dan menyediakan data informasi dalam mendukung pelayanan kesehatan. Cara pemerintah kota Banda Aceh dalam penerapan model gampong sehat dengan melakukan strategi persiapan

mengumpulkan data informasi kesehatan, kesiapan gampong mengikuti model gampong sehat, kebijakan model gampong sehat, serta peran pemangku kepentingan dan Penghambatan dalam menyukseskan model gampong sehat.⁴

Penelitian kedua dilakukan oleh Hasanuddin Nur dengan judul Implementasi Program Desa Sehat Di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya Pemerintah Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dalam Program Desa Sehat dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi program desa sehat di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mengkaji objek yang menggunakan fenomena fenomena yang ada secara konstektual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Penelitian ini berlokasi di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, dilaksanakan mulai Juni sampai Agustus 2018. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder, diperoleh dari sumber bacaan dan dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan berdasarkan model analisis interaktif dengan tiga aktivitas, yaitu : Pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa upaya pemerintah Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

⁴ Firman Ilmi, Dahlan Dahlan dengan judul Kebijakan Pemerintah Banda Aceh Dalam Pembangunan Kesehatan Desa. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala 2017 Jurnal.

dalam melaksanakan Program Desa Sehat sudah cukup lumayan namun masih perlu kerja keras oleh pemerintah desa dan pihak kesehatan untuk lebih meningkatkan program desa sehat. Sementara itu faktor pendukung dalam Program Desa Sehat ini yaitu petugas/tenaga kesehatan yang memberikan penyuluhan kesehatan, perangkat desa sebagai ujung tombak dalam mensukseskan program desa sehat dan sarana dan prasarana yang memadai merupakan wadah masyarakat dalam menerima informasi dan bimbingan penyuluhan kesehatan.⁵

Penelitian ketiga dilakukan oleh Surahma Asti Mulasari dengan judul Membangun Kota Sehat (Healthy City) Menuju Indonesia Sehat Berkemajuan. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Surahma Asti Mulasari. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pembangunan kesehatan adalah upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Diperlukan peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Permasalahan umum yang berkaitan dengan Kota Sehat adalah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui program Kota Sehat yang sudah dicanangkan. Masalah umum lainnya adalah belum adanya kerjasama lintas sektor yang baik. Tidak semua kota terbentuk Forum Kota Sehat (FKS). Jika terbentuk, antara anggota pengurus sendiri juga belum ada keterpaduan dalam persepsi dan pelaksanaan kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk

⁵ Hasanuddin Nur, Implementasi Program Desa Sehat Di Desa Pacellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa 2019. Jurnal

meningkatkan pengetahuan tentang kota sehat, manfaat serta langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menjadi kawasan pemukiman, sarana, dan prasarana umum yang sehat. Metode yang digunakan adalah melalui ceramah (talkshow), tanya jawab serta diskusi permasalahan tentang kota sehat. Sasaran pengabdian yaitu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan dan masyarakat umum yang memiliki respon baik terhadap program yang sudah dilaksanakan. Pada saat kegiatan pengabdian dilaksanakan, tamu undangan hadir dan berpartisipasi aktif selama proses talkshow berlangsung.⁶

Penelitian keempat dilakukan oleh Hasanuddin dengan judul Implementasi Program Desa Sehat Di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis upaya Pemerintah Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dalam Program Desa Sehat dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi program desa sehat di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mengkaji objek yang menggunakan fenomena fenomena yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Penelitian ini berlokasi di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, dilaksanakan mulai Juni sampai Agustus 2018. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, sedangkan

⁶ Surahma Asti Mulasari, Membangun Kota Sehat (Healthy City) Menuju Indonesia Sehat Berkemajuan. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Surahma Asti Mulasari. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 2018 Skripsi

data sekunder, diperoleh dari sumber bacaan dan dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan berdasarkan model analisis interaktif dengan tiga aktivitas, yaitu : Pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa upaya pemerintah Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dalam melaksanakan Program Desa Sehat sudah cukup lumayan namun masih perlu kerja keras oleh pemerintah desa dan pihak kesehatan untuk lebih meningkatkan program desa sehat. Sementara itu faktor pendukung dalam Program Desa Sehat ini yaitu petugas/tenaga kesehatan yang memberikan penyuluhan kesehatan, perangkat desa sebagai ujung tombak dalam mensukseskan program desa sehat dan sarana dan prasarana yang memadai merupakan wadah masyarakat dalam menerima informasi dan bimbingan penyuluhan kesehatan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Maulani, Choirunnisa Insyrah (2019) Implementasi Program Gerakan Desa Sehat Dan Cerdas di Desa Plesungan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Penelitian ini didasarkan pada permasalahan kesejahteraan di desa yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menjalankan Program Gerakan Desa Sehat dan Cerdas di Desa Plesungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial di desa. Selain itu program Gerakan Desa Sehat dan Cerdas ini juga merupakan salah satu penilaian untuk mewujudkan Desa Madani dan meraih GDSC Award. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis. Pertama, bagaimana implementasi program Gerakan Desa Sehat dan Cerdas di Desa Plesungan, dan yang kedua untuk

mengetahui apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menjalankan program gerakan desa sehat dan cerdas di Desa Plesungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa data yang digunakan adalah model analisa interaktif dengan empat prosedur yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, lalu kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi program gerakan desa sehat dan cerdas di desa plesungan dilakukan melalui tiga tahap yaitu interpretasi, organisasi, dan aplikasi yang didasarkan pada teori David C. Korten. Proses Program dilakukan melalui sosialisasi program gerakan desa sehat dan cerdas dan juga koordinasi pada pembentukan program agar efektif sesuai dengan permasalahan yang di tengah masyarakat, sementara untuk proses organisasi dilakukan dengan pembentukan pihak pelaksana dan pengawas program secara sukarela, penganggaran dan juga penetapan sumber daya sesuai dengan mekanisme di desa plesungan. Sedangkan Pemanfaat program Gerakan desa sehat dan cerdas di Desa Plesungan dilakukan dengan mengajak masyarakat desa berpartisipasi. Faktor pendukung dari implementasi program gerakan desa sehat dan cerdas di desa plesungan adalah dukungan dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat sedangkan faktor penghambatnya menyangkut masalah pengenalan atau sosialisasi program yang membutuhkan waktu terutama pada warga yang sudah berumur 60 keatas dan keterbatasan sumber daya. Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar pemerintah Desa Plesungan harus bisa berkerja sama dengan penduduk usia aktif untuk mengatasi masalah sosialisasi pada warga usia non aktif melalui wadah karang taruna atau instansi formal seperti sekolah agar masyarakat

paham tentang program ini Selain itu, pemerintah juga bisa mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai pelaksana dan pengawas program agar keterbatasan sumber daya manusia bisa diatasi.

Penelitian keenam dilakukan oleh Nurgawan dengan judul Pelaksanaan Kebijakan SDGS Desa Dalam Mewujudkan Desa Sehat Dan Sejahtera Di Desa Petirhilir (Studi pada Desa Petirhilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis mengenai bagaimana Pelaksanaan kebijakan SDGs Desa Dalam Mewujudkan Desa Sehat Dan Sejahtera di Desa Petirhilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan kebijakan SDGs Desa Dalam Mewujudkan Desa Sehat Dan Sejahtera di Desa Petirhilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan suatu kegiatan tanya jawab yang dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan. Wawancara tersebut meliputi Kepala Desa Petirhilir, sekretaris Desa Petirhilir serta perangkat Desa Petirhilir. Selain melakukan wawancara juga melakukan observasi dan dokumentasi. Dimana observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara pengamatan serta pencatatan terhadap hal-hal yang dianggap penting, observasi ini dilakukan secara langsung ke Desa Petirhilir. Dan yang terakhir dengan menggunakan dokumentasi, dimana dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan gambar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Petirhilir masih terdapat masalah dalam bidang kesehatan diantaranya yaitu: Stunting dan Gizi buruk, dimana pengidap stunting berjumlah dua orang sementara pengidap gizi buruk berjumlah delapan orang. Namun pemerintah Desa Petirhilir, melaksanakan kebijakan SDGs Desa Sehat dan Sejahtera dengan mengadakan sosialisasi pola hidup sehat, pengadaan kelas ibu hamil, pelaksanaan posyandu, pemberian asi eksklusif, jamban sehat, serta pengadaan program air bersih dan bank sampah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kebijakan Publik

Ada beberapa teori tentang kebijakan, diantaranya menurut Ealau dan Pewit “kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut.” Titmuss mendefinisikan “kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.” Sedangkan menurut Edi Suharto “kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.”⁷ Penyebab timbulnya penetapan kebijakan yang seharusnya karena kebijakan berorientasi pada pelayanan publik yang sesuai dengan makna Negara demokrasi, dimana Negara demokrasi yaitu Negara yang

⁷*Konsep Kebijakan Publik*, diakses di konsep-kebijakan-publik.html, diakses pada 8 Agustus 2021

sukses dan cerdas dalam meletakkan pondasi pelayanan publik dengan nilai-nilai demokrasi yang memuaskan kebutuhan semua golongan dari warga Negara.

Demokrasi artinya masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhannya dengan standar perilaku, etika, dan integritas yang profesional, setiap instansi harus bisa memberikan kualitas pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Namun fakta yang terjadi, kebijakan juga timbul akibat kepentingan beberapa kalangan saja atau kepentingan para elit-elit politik. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu fungsi politik yaitu untuk membuat kebijakan, dimana kebijakan dibuat karena adanya masalah sosial maupun karena adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan bisa jadi berubah-ubah, dalam hal ini kebijakan sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi.

Di dalam kebijakan publik terdapat konsep kebijakannya, konsep kebijakan publik merupakan suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan, konsep kebijakan publik sebagaimana uraian di bawah ini

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.

Perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan melibatkan satu organisasi atau satu aktor/pelaku, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor

dan organisasi yang masing-masing harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks. Kebijakan dan keputusan dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

- a. Kebijakan itu ruang lingkupnya jauh lebih besar dibandingkan keputusan
 - b. Meskipun dalam keputusan tunggal mungkin terdapat juga langkah-langkah tertentu yang rumit bahkan kritis, utamanya pada saat-saat penentuan pilihan terbaik diantara berbagai macam pilihan yang tersedia
 - c. Konsep keputusan sering dikaitkan dengan apa yang disebut pembuat keputusan (decision maker)
2. Kebijakan sebenarnya tidak secara serta merta dapat dibedakan dari administrasi alasannya yang sering dikemukakan bahwa para administrator seharusnya hanya bertindak selaku penasehat penasehat menteri mengenai berbagai masalah kebijakan yang rumit dan kritis, termasuk masalah mengenai penentuan tujuan dan prioritas-prioritas, menentukan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber-sumber atau masalah-masalah yang menyangkut strategi-strategi umum yang ingin dicapai oleh pemerintah.
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. Suatu kebijakan yang baik tidak boleh mengabaikan perilaku dari mereka yang merumuskan kebijakan itu, mengimplementasikan dan meresponnya.

4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja serta keputusan-keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan di capai, yang mungkin yang dapat diantisipasi sebelum (diperkirakan sebelumnya) atau mungkin belum dapat diantisipasi. Oleh karena itu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula meneliti dengan cermat baik hasil-hasil yang diharapkan maupun hasil-hasil yang senyatanya dicapai. Karena upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil-hasil yang tidak di harapkan jelas tidak akan dapat menggambarkan praktek kebijakan yang sebenarnya.
6. Perlunya setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik eksplisit maupun implisit. Suatu kebijakan sudah termaksud tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam prakteknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sebagian, begitu waktu yang berlalu.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan tertentu di rumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan bukan mustahil pada tahap ini akan timbul umpan balik. Umpan balik ini bisa disebabkan oleh adanya akses tertentu atau akibat-akibat tertentu yang tidak diharapkan dan belum diantisipasi. Adanya umpan balik ini mungkin dapat berakibat

berubahnya tujuan kebijakan, arah kebijakan atau organisasi yang melaksanakan kebijakan tersebut.

8. Kebijakan meliputi baik hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi maupun bersifat intra organisasi (antar unit-unit dalam lingkungan organisasi tertentu).
9. Kebijakan Negara menyangkut peran kunci dari lembaga lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif.
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Di dalam memberikan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Sesungguhnya di dalam menangkap dan memahami suatu gejala kita cenderung menggunakan lensa konseptual kita sendiri, tidak dilakukan secara objektif.⁸

Terdapat siklus atau tahapan-tahapan pembuatan kebijakan di dalam proses suatu kebijakan publik, menurut Willam N. Dunn adalah sebagai berikut:⁹

1. Penyusunan Agenda (Perumusan Masalah)

Perumusan masalah adalah proses dimana dapat membantu menemukan asumsi asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan yang memandukan pandangan yang bertengah dan merancang peluang peluang kebijakan yang baru. Dari sinilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut

⁸ Jeane Elisabeth Langkai, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang, Jawa Timur: CV Seribu Bintang, 2019), hal. 25-39

⁹ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), hal. 172-173

sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

2. Formulasi Kebijakan (Peramalan)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi pada masa mendatang sebagai akibat dari yang diambilnya alternatif, atau tidaknya melakukan sesuatu. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Adopsi Kebijakan (Rekomendasi)

Pilihan kebijakan yang ada pada formulasi maka akan di adopsi atau dipilih yang di nilai masalah yang paling urgen. Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya pada masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimasi untuk memberikan otoritas atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Adopsi Kebijakan juga bisa dikatakan proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

4. Implementasi Kebijakan (Pemantauan)

Yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Implementasi Kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas. Pemantauan membantu tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

5. Evaluasi Kebijakan (Penilaian)

Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai cara masalah terselesaikan tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyusuaian, dan perumusan kembali masalah, yang mana ini merupakan proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Setelah suatu kebijakan diterapkan dan diberlakukan dalam kurun waktu tertentu, maka evaluasi dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri.

2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam keseluruhan struktur dan proses kebijakan, karena melalui tahap ini dapat diketahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.¹⁰ Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dari proses tindakan kebijakan setelah penetapan di dalam peraturan undang-undang dan juga bisa dikatakan pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang di mana seluruh aktor yang terkait bekerja sama untuk menjalankan kebijakan tersebut guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Maka dari itu, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh

¹⁰ Tirtayasa Serang, 2010), hal. 39-40, <http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/>, diakses pada 20 Agustus 2021

berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan yang paling utama adalah uang. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban pekerjaan.”¹¹

Menurut Mazmanian dan Sabatier, “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan penelitian.” Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang mengambil keputusan

¹¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hal. 145

sebagaimana dipersiapkan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas yang mendefinisikan tentang implementasi, maka dapat disimpulkan bahwa, implementasi yaitu suatu proses pelaksanaan keputusan setelah undang-undang ditetapkan oleh setiap aktor yang terkait melalui tahapan-tahapan guna untuk mencapai suatu tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan melalui keputusan-keputusan.

Menurut Teori George C. Edwards III Dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi (2) sumber daya (3)disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

a) Variabel komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang, badan atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat dalam hal ini adalah suatu proses penyampain informasi oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai suatu kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

1. Transmisi: maksudnya dalam komunikasi sering terjadi salah pengertian (miskomunikasi) hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
2. Kejelasan : komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
3. Konsistensi : perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan), karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

b) Variabel sumberdaya

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi implementasi kebijakan. Oleh sebab itu perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersedianya sumber-sumber pendukung implementasi kebijakan tersebut. Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

1. Staf : kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
 2. Informasi : dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
 3. Wewenang: pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
 4. Fasilitas : fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Dalam artian sarana dan prasarana
- c) Variabel disposisi (sikap dari pelaksana kebijakan).

Dalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementator kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang mendukung agar implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. Disposisi merupakan keinginan atau kesepakatan dikalangan aktor untuk implementasi kebijakan secara efektif, pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki

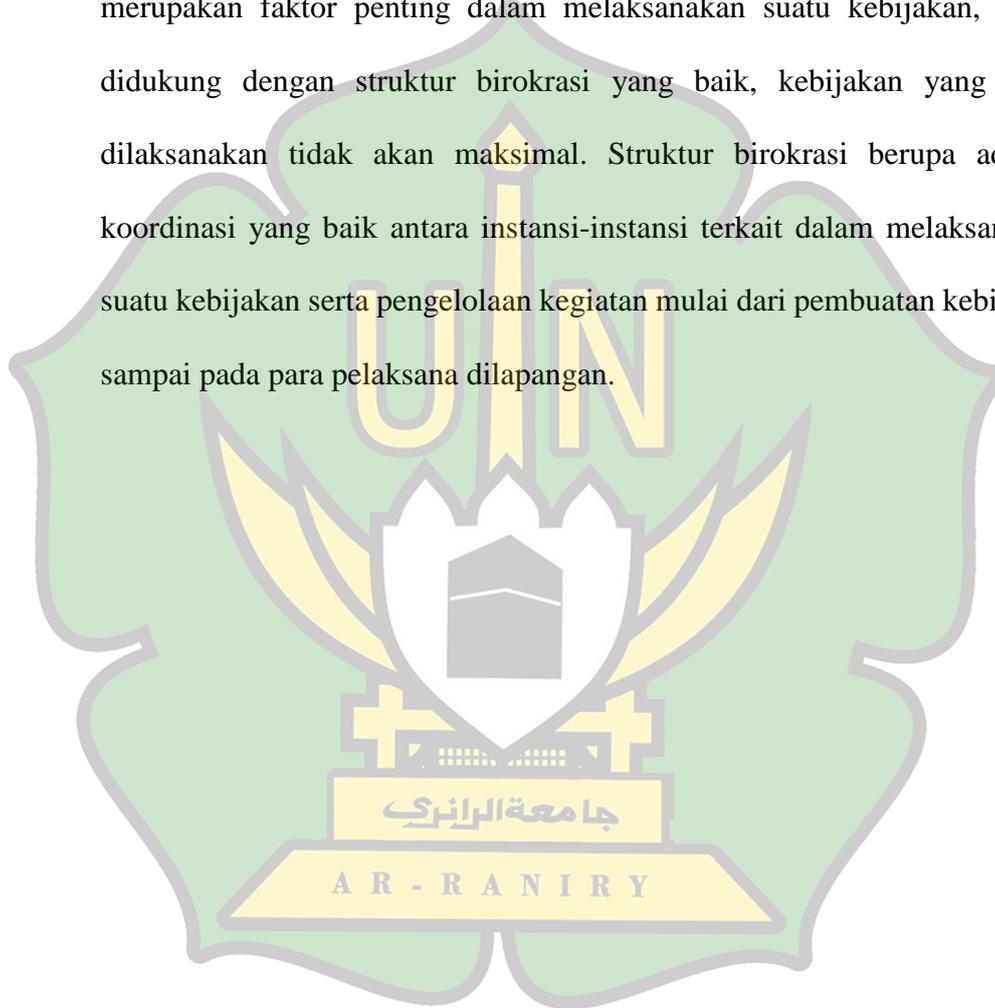
kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut. Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementator implementator untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

1. Pengangkatan birokrat : dalam artian pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
2. Insentif : dalam artian memanipulasi insentif dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah kebijakan dengan baik. Hali ini dilakukan dalam sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) satu organisasi.

d) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Walaupun variabel lainnya sudah terpenuhi dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan. Namun karena struktur birokrasi yang lemah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur

birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, tanpa didukung dengan struktur birokrasi yang baik, kebijakan yang akan dilaksanakan tidak akan maksimal. Struktur birokrasi berupa adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan suatu kebijakan serta pengelolaan kegiatan mulai dari pembuatan kebijakan sampai pada para pelaksana dilapangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pembangunan Kesehatan Gampong Studi kasus: Program Model Gampong Sehat Di Gampong Lamgugop Kota Banda Aceh). Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.¹² Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pembangunan Kesehatan Gampong Studi kasus: Program Model Gampong Sehat Di Gampong Lamgugop Kota Banda Aceh)

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Gampong Lamgugop dengan pertimbangan gampong tersebut masih ada kawasan kumuh yang dapat menimbulkan gejala dampak buruk kesehatan seperti demam berdarah, saat setelah hujan banyak genangan air

¹² Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

tertinggal, dan amburadul dalam pengelolaan sampah yang mengakibatkan memunculkan penyakit.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian Program Gampong Sehat

3.5. Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|----|---------------------------------|--------|
| 1 | Dinas Kesehatan Banda Aceh | 1 |
| 2 | Puskesmas Kecamatan Syiah Kuala | 1 |
| 3 | Geuchik Gampong Lamgugop | 1 |
| 4 | Masyarakat Lamgugop | 3 |

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹³ Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).¹⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode

¹³Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

¹⁴Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23

dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.¹⁵

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

- Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

- Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

- Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang

¹⁵Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Gampong Lamgugop

a) Sejarah Gampong Lamgugop

Dari cerita historis tokoh-tokoh gampong, Gampong Lamgugob sudah ada sejak zaman Pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Lamgugob pada masa itu merupakan gampong yang sudah maju dengan jumlah penduduk yang banyak dan termasuk dalam wilayah Mukim Kayee Adang. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya batu nisan yang berukir dari makam-makam yang sudah sangat lama.¹⁶

Konon Penamaan Gampong Lamgugob terkait dengan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Dimana masyarakat gampong yang hidup dalam suasana tentram dan damai pada saat datang sekelompok tentara Belanda dan dikejutkan dengan munculnya seekor babi liar (bui). Orang-orang memperkirakan babi liar itu berasal dari sebuah gampong yang jauh yaitu Le Bui (artinya banyak babi) yang sekarang menjadi Labui yang masuk dalam wilayah Aceh Besar. Masuknya babi tersebut membuat hampir semua penduduk gampong menjadi panik (bahasa acehnya “gugob”), inilah yang kemudian menjadi nama gampong Lamgugob. Kata Lam diawal bermakna gampong atau desa.¹⁷

¹⁶ Diakses melalui website resmi Gampong Lamgugob <http://lamgugob-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 20 Juni 2023

¹⁷ Diakses melalui website resmi Gampong Lamgugob <http://lamgugob-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 20 Juni 2023

Gampong Lamgugob dulunya merupakan wilayah pertanian, perkebunan, perikanan dan juga perdagangan. Masyarakat pada masa itu bermata-pencarian sebagai petani sawah, petani tambak, petani kebun, dan sebagiannya adalah pedagang. Dahulunya di Lamgugob juga terdapat tenun tradisional yang sangat terkenal dikalangan kerajaan Aceh, yaitu kain tenun Lamgugob. Pada masa itu tenun Lamgugob (Ija Lamgugob) merupakan pakaian khusus bagi laki-laki yang diikatkan di pinggang di luar celana panjang gunanya adalah untuk kesopanan yaitu menutup selangkang celana yg digunakan. Namun sayang tenun Lamgugob kini tinggal kenangan.¹⁸

Dahulunya gampong Lamgugob terdiri dari empat Dusun. Yaitu Dusun Kayee Adang, Dusun Peurada, Dusun Tunggai, dan dusun Lamnyong. Seiring perjalanan waktu, Dusun Peurada kini sudah menjadi Gampong definitif yang berdiri sendiri, sehingga di Lamgugob kini hanya tinggal tiga dusun saja.¹⁹

Sesuai dengan jumlah penduduk, maka sejak tahun 2016 Lamgugob mempunyai lima Ulee Jurong, yaitu : Ulee Jurong Kayee Adang Timu, Ulee Jurong Kayee Adang Barat, Ulee Jurong Tunggai Timu, Ulee Jurong Tunggai Barat, dan Ulee Jurong Lamnyong.²⁰

¹⁸ Diakses melalui website resmi Gampong Lamgugob <http://lamgugob-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 20 Juni 2023

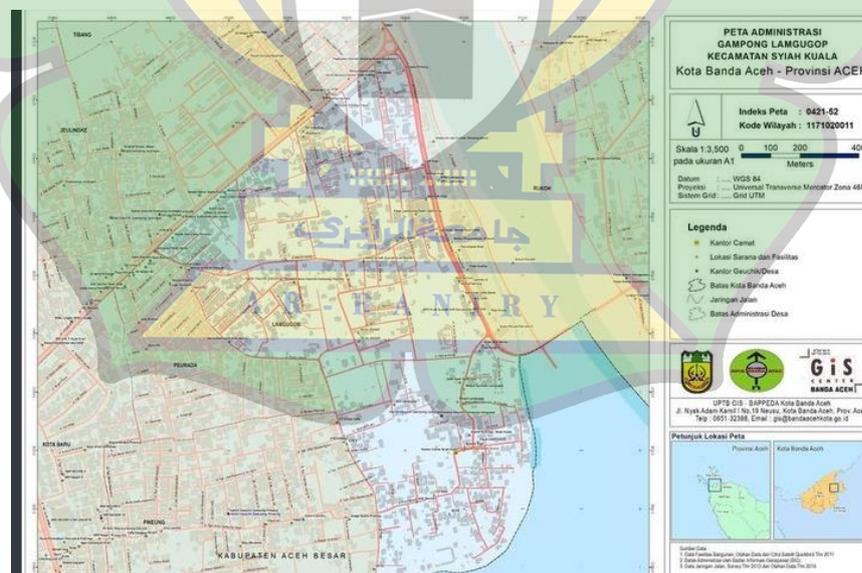
¹⁹ Diakses melalui website resmi Gampong Lamgugob <http://lamgugob-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 20 Juni 2023

²⁰ Diakses melalui website resmi Gampong Lamgugob <http://lamgugob-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 20 Juni 2023

b) Letak dan Demografi

Gampong Lamgugob merupakan ibu kota Kecamatan Syiah Kuala dengan luas wilayah 102 Ha. Adapun batas-batas Gampong Lamgugob adalah sebagai berikut :²¹

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Jeulingke.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Pineung dan Gampung Ie Masen Kayee Adang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pineung dan Gampong Peurada.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Meunasah Papeun Aceh Besar.



Gambar 4.1. Peta Gampong Lamgugob

²¹ Diakses melalui website resmi Gampong Lamgugob <http://lamgugob-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 20 Juni 2023

Jumlah Dusun yang ada di Gampong Lamgugob terdiri atas 3 (tiga)

Dusun yang dibagi kepada 5 (lima) Jurong yaitu:

| No | Dusun/Jurong | Luas Wilayah | |
|----|---|------------------|---------------------|
| 1 | Dusun Kayee Adang : 1. Jurong Kayee Adang Timur 2. Jurong Kayee Adang Barat | 41,82 ha | 380.000 m2 |
| 2 | Dusun Lamnyong : 1. Jurong Lamnyong | 24,48 ha | 220.000 m2 |
| 3 | Dusun Tunggai : 1. Jurong Tunggai Timur 2. Jurong Tunggai Barat | 35,70 ha | 420.000 m2 |
| | Total | 102,00 ha | 1.020.000 m2 |

Gambar 4.1. Dusun Lamgugob

Gampong Lamgugob mempunyai jumlah penduduk 5.061 Jiwa, yang tersebar dalam 3 Dusun dengan Perincian tabel sebagai berikut ini:

| Dusun Kayee Adang | Dusun Lamnyong | Dusun Tunggai |
|-------------------|----------------|---------------|
| 2.177 Jiwa | 514 Jiwa | 2.370 Jiwa |

Gambar 4.1.1. Jumlah Penduduk Lamgugob

Dengan tingkat Pendidikan masyarakat Gampong Lamgugob adalah sebagai berikut:

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah Jiwa |
|-----|---------------------------|--------------|
| | Tidak/ Belum Sekolah | 708 |
| | Belum Tamat SD/ Sederajat | 354 |
| | Tamat SD/ Sederajat | 289 |
| | SD/ Sederajat | 643 |
| | SLTP/ Sederajat | 396 |
| | SLTA/ Sederajat | 1.446 |
| | Diploma I/II | 71 |
| | Akademi/ Diploma III | 243 |
| | Diploma IV/ Strata I | 760 |
| | Strata II | 136 |
| | Strata III | 15 |
| | JUMLAH | 5.061 |

Gambar 4.1.2. Tingkat Pendidikan Lamgugob

c) Visi Misi

VISI

Visi adalah suatu cita-cita, angan-angan, keadaan tentang masa depan dalam kurun waktu yang diinginkan oleh masyarakat yang pewujudannya dapat terukur secara jelas baik secara kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan permasalahan, potensi, kebutuhan masyarakat berdasarkan sekala prioritas.

Penyusunan Visi Gampong Lamgugob, adalah konsukuensi politik seorang Keuchik selaku Kepala Pemerintahan kepada masyarakat Gampong

Lamgugob dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembangunan Kota Banda Aceh. Dalam mewujudkan visi tersebut maka sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 maka penyusunannya dilakukan secara partisipatif melalui peran lembaga di Gampong seperti Tuha Peut Gampong, Keuchik , Aparatur Gampong, BKM, PKK, Pemuda, dan Tokoh-tokoh Masyarakat. Berdasarkan Kondisi Geografis, Demografis dan Sosio Kultural Gampong Lamgugob menjadi Pertimbangan untuk mewujudkan Gampong Lamgugob dalam Visi :²²

“Terwujudnya Gampong Lamgugob Yang,”Satwita” Sejahtera, Aman, Tertib, Wibawa, Inisiatif, Teguh, Asri.

SEJAHTERA :

Suatu kondisi dimana masyarakat Gampong Lamgugob mampu mandiri, serta meningkatkan taraf hidup yang seimbang dan Kompetitif di segala aspek Pembangunan.

AMAN :

Dimana keadaan dan kondisi Gampong Lamgugob yang mampu menangkal segala ancaman keamanan baik internal, maupun eksternal dengan meningkatkan Persatuan dan Kesatuan masyarakat Gampong.

²² Diakses melalui website resmi Gampong Lamgugob <http://lamgugob-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 20 Juni 2023

TERTIB :

Kondisi masyarakat Gampong Lamgugob yang selalu menghormati segala norma dan aturan Perundangan yang berlaku, dengan selalu mengutamakan kepentingan umum dan orang banyak, serta masyarakat yang selalu mampu menghindar dari berbagai ancaman yang mengganggu ketertiban Gampong.

WIBAWA :

Pencerminan dan Implementasi dari sebuah Pemerintahan yang bersih, pelayanan terpadu dari Pemerintahan Gampong yang menjadi tauladan bagi masyarakat sehingga seluruh masyarakatpun selalu menjaga kewibawaan Gampongnya melalui sadar Hukum dan menghormati norma-norma yang berlaku.

INISIATIF :

Situasi kondisi Gampong Lamgugob yang selalu mampu melihat dan memanfaatkan setiap celah dan kesempatan yang ada untuk bersama dalam meningkatkan kualitas hidup, yang mencakup kesejahteraan anggota keluarganya.

TEGUH :

Keadaan masyarakat Gampong Lamgugob yang selalu mempertahankan Agama, Budaya, dan Adat-istiadat, yang berlandaskan Kasih Sayang dan Saling Menghormati, serta Tolong-menolong.

ASRI :

Keadaan masyarakat Gampong Lamgugob yang selalu memperhatikan lingkungannya, dengan penataan lingkungan serta menjaga kebersihan Gampong.

MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, tentunya harus ditetapkan pokok-pokok program atau penjabaran dari sebuah visi dimaksud. Penjabaran visi dalam pokok-pokok program atau disebut dengan MISI agar lebih mudah dilaksanakan, dioperasionalkan, diimplementasikan sehingga bisa terukur nantinya. Adapun Program Pokok yang digariskan nantinya adalah :²³

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat Gampong dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah melalui berbagai program pendukung.
2. Menciptakan pelayanan masyarakat yang baik profesional, optimal, dengan mengedepankan aparatur Pemerintah Gampong yang Bersih, berwibawa, disiplin, kreatif.
3. Meningkatkan derajat hidup masyarakat kearah yang lebih baik melalui program kesehatan ibu dan anak dan kesehatan linkungan.
4. Menumbuhkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik sektor pertanian,

²³ Diakses melalui website resmi Gampong Lamgugob <http://lamgugob-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 20 Juni 2023

dan peternakan dan industri bersekala rumah tangga dengan diimbangi pelestarian lingkungan.

5. Pembangunan SDM, bidang pendidikan terutama pengentasan wajib belajar 9 tahun,
6. Membangun sarana dan prasarana gampong untuk mempermudah akses masyarakat dalam beraktifitas dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan.
7. Mengoptimalkan peran lembaga di Tingkat Gampong dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah Gampong dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

4.2. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan Inovasi Program Model Gampong Sehat di Gampong Lamgugop.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu

menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kesehatan mengamanahkan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I. Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2019–2024 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra).

Pembangunan kesehatan pada periode 2019-2024 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia dituangkan dalam sasaran pokok RPJMN 2015-2019 Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sementara itu pilar jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Berdasarkan penelitian ini. Akan ditulis kualitas kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota Banda Aceh sejak dilahirkan kebijakan MGS ini pada tahun 2014. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-pratik sosial yang ada dalam masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala dalam Penerapan Inovasi Program model gampong sehat Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni: Pertama dikenal dengan istilah analisis kebijakan (*Policy analysis*), dan kedua kebijakan publik politik (*political public policy*). Pada pendekatan pertama, studi analisi kebijakan lebih terfokus pada sebuah pembuatan keputusan (*desicion making*) dan penetapan kebijakan (*policy formation*) dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih. Sedangkan pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan.

Proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut (1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), (2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), (3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), (3) Implementasi kebijakan (*policy implementasion*), (4) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

4.4.1. Penyusunan Agenda

Untuk mencapai sasaran kebijakan yang lebih baik pemerintah melalui dinas kesehatan Kota Banda Aceh terus berupaya menimplementasikan dengan beberapa tahapan secara rinci guna mencapai sasaran yang ada dilapangan dengan disesuaikan keadaan lingkungan dan sosial sekitar sehingga masyarakat membuka lebar menerima kebijakan program model gampong sehat tersebut.

Strategi persiapan dalam mengumpulkan data dan informasi tentang model gampong sehat yang dilakukan dinas kesehatan Kota Banda Aceh dalam penyusunan agenda kebijakan menurut ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu (1) membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar segala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; (2) Membuat batasan masalah dan (3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Dengan hal ini proses dalam perumusan kebijakan perlu ada tahap dalam penentuan sehingga dalam penerapan model gampong bisa terarah semestinya.

4.4.2. Formulasi Kebijakan dan Pembuatan Kebijakan

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan terpilih. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan model

gampong sehat itu adalah dengan melaksanakan pembangunan metode dilakukan melalui 2 tahap penulis akan menganalisis yakni

- a) Tahap Strategis: Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan model gampong sehat.

Dalam mewujudkan program pemerintah berkenaan dengan model gampong sehat maka yang dilapangan perlu ada persiapan mendalam dalam hal ini data dan informasi sehingga sebagai langkah awal suatu proses untuk menyukseskan suatu program perlu ada kesiapan yang akurat dan efektif untuk menggapai program yang diinginkan tepat sasaran.

Pelaksanaan program ini harus benar-benar berdasarkan nilai yang objektif kemasayarakat didasarkan atas indeks yang mempengaruhi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa:

Tujuan daripada dilaksanakan program ini adalah untuk membawa kesehatan masyarakat yang lebih baik. Kami sangat serius dalam mengembangkan program ini dengan tepat sasaran sehingga masyarakat bisa menikmati dengan nyata. Untuk menggapai tujuan program tersebut perlu ada kerjasama dari DPRK, kepolisian, aparat kecamatan maupun tingkat Gampong.²⁴

Selanjutnya disampaikan juga bahwa kerjasama antar institusi perlu dilakukan sehingga dalam menjalankan program ini menjadi terkomunikasi dengan baik. Adapun hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh bahwa:

²⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023

Dalam penerapan MOS pihak kecamatan sebagai yang mengawasi gampong mendapat kewenangan tinggi dalam jajaran kecamatan yang dibawahnya meliputi beberapa Gampong turut andil memberi data dan informasi tentang Gampong yang layak untuk mewakili nominasi Gampong Sehat.²⁵

Kecamatan sebagai salah satu instansi yang diberi kewenangan tinggi dalam hal ini Puskesmas meningkatkan kordinasi dengan pemerintah gampong turut berperan dalam melakukan pengolahan data. Sehingga dalam persiapan program ini guna terlaksana dengan baik karena disini peran pihak puskesmas juga terlibat dalam memberi data dan informasi dalam mempersiapkan program ini. Hal ini diungkapkan Kepala Puskesmas Syiah Kuala dalam wawancaranya bahwa:

Kami sebagai instansi membawahi dinkes kota Banda Aceh sudah diberi mandat untuk pembinaan kesehatan dikecamatan dalam hal ini mencari data dan informasi dengan cara survey untuk keperluan melahirkan model Gampong Sehat.²⁶

Selanjutnya penerapan program hasil kebijakan dari Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kesehatannya yakni tentang model Gampong sehat sehingga Gampong salah satu lokasi implementasi program tersebut perlu kesiapan dalam dari segi apapun guna menyukseskan kebijakan Pemerintah kota dalam penerapan model Gampong Sehat. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa:

Gampong salah satu lokasi penerapan Model Gampong sehat sehingga dalam penerapan kebijakan perlu adanya dukungan para

²⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023

²⁶ Wawancara dengan Kepala Puskesmas Syiah Kuala Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Juni 2023

perangkat Gampong dan masyarakat maka dengan ada dukungan seperti itu penerapan kebijakan bisa berjalan dengan baik apa yang ditargetkan.²⁷

Gampong sebagai tuan rumah dalam penerapan kebijakan pemerintah kota dalam hal ini program model gampong sehat di gampong Lamgugop salah satu gampong termasuk wilayah kota Banda Aceh dan memiliki penduduk 4.067 jiwa sehingga wilayah tersebut yang memasuki 2 kategori (Masyarakat Pedagang) dan masyarakat Komplek perlu diterapkan program ini. Setelah berjalannya program ini selama beberapa tahun Gampong Lampong Lamgugop Aceh sudah dalam tahap pembimbingan. Hal ini diperjelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa:

Saat ini kami sudah melakukan survey 4 gampong dari 10 gampong yang ada di kecamatan Syiah Kuala dari hasil survey 4 gampong tersebut satu gampong sudah dikategorikan cocok menjadi gampong binaan yaitu Gampong Lamgugop.²⁸

Gampong mempunyai terdiri dari beberapa struktur Pemerintahan Gampong yang dipimpin seorang Geuchik sehingga dalam implementasi program MGS perlu dukungan yang penuh dari beberapa perangkat Gampong dari kesediaan apa yang diperlukan oleh pihak pemerintah Kota dalam Hal ini dinas Kesehatan Kota Banda Aceh seperti halnya sistem informasi, regulas dll. Hal ini didukung oleh Geuchik Lamgugop menyatakan bahwa:

²⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023

²⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023

kami sangat mendukung apabila diperlukan oleh dinas kesehatan yang menyangkut kesehatan masyarakat, dengan segala upaya kami siap menjalan kebijakan dari pemerintah kota tentang MGS karena program ini sangat inovatif mencegah hal hal yang tidak diinginkan tentang kesehatan kita sangat apriasi program ini.²⁹

Maka dengan seluruh elemen aparatur Gampong dan para tokoh masyarakat saling dukung dalam menerima kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam pembangunan kesehatan gampong yang berinovatif pencegahan dapat dilakukan tingkat gampong sehingga masyarakat lebih nyaman dalam berkehidupan dilingkungannya.

b) Tahap Sosialisasi Internal dan eksternal

Dilakukan dengan cara berkordinasi dengan pihak dinkes, SKPD terkait, Camat, aparat Gampong dan LSM kemudian secara eksternal dalam rangka meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan/menerapkan pola hidup sehat.

Menjalankan sebuah program perlu ada sosialisasi secara intimal dengan struktural yang ada di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh guna memperoleh pengetahuan dan arah tujuan berkenaan dengan program yang dijalankan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa:

Sebelum kami memperkenalkan program ini kelapangan, maka terlebih dahulu membuat sosialisasi secara rutin diinternal dengan seluruh pejabat struktural di intansi dinkes Kota Banda Aceh. Kemudian sosialisai dengan jajaran kesehatan seperti pejabat

²⁹ Wawancara dengan geuchik gampong Lamgugob Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Juni 2023

struktural puskesmas dan aparat di kecamatan seperti polsek, kodim maupun jajaran kecamatan sehingga dipahami konsep MGS tersebut dengan seksama.³⁰

Setelah melakukan sosialisasi secara internal maka perlu dilakukan sosialisasi secara eksternal dengan pihak Puskesmas maupun kecamatan guna memberi informasi tentang diterapkan MGS. Diungkapkan oleh kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa:

Maka perlu duduk kembali beberapa instansi yang terlibat dengan MOS seperti 11 Puskesmas dan 9 Kecamatan guna membahas bentuk-bentuk penilaian untuk Gampong di wakikan setiap kecamatan Gampong Sehat.³¹

4.4.3. Implementasi Kebijakan

Tahap Persiapan selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan danrealisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.

³⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023

³¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023

Adapun Implementasi yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dinas Kesehatan untuk mewujudkan model gampong sehat adalah dengan melaksanakan proses tahapan berjenjang sehingga penulis akan menganalisis. Sejak diberlakukannya model gampong sehat pada tahun 2014 proses yang dilakukan oleh dinas kesehatan untuk membangun kesehatan yang lebih baik yang langsung berupaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tentang kesehatan disuatu gampong, maka perlu membangun pola rencana pembangunan bidang kesehatan terdiri dari jangka pendek guna membangun komitmen stakeholders, menyusun indikator gampong sehat sehingga menentukan lokasi gampong pilot model gampong sehat serta membentuk tim Model Gampong Sehat. Untuk melakukan jangka menengah pihak dinas kesehatan melakukan capacity building tim dengan melakukan survey lingkungan digampong pilot area crash program. Untuk jangka panjang pihak dinas kesehatan terus berupaya sosialisasi dengan rehabilitasi prasarana dan sarana apabila semua terpenuhi maka pihak tim dari dinas kesehatan melakukan launching model gampong sehat dengan melakukan replikasi, pola positive deviance. Oleh sebab itu dengan adanya pembangunan jangka pendek, menengah maupun panjang diharapkan mampu melakukan perbaikan kesehatan ditingkat gampong dengan adanya program Model Gampong Sehat tersebut.

Peran pemangku kepentingan (*Stakeholder*) sangat mendukung dalam menjalani program model gampong sehat ini karena para pemangku kepentingan ini memiliki kewenangan ataupun memiliki pengaruh dalam kawasan lingkungan tersebut. Dengan demikian untuk mencapai proses implementasi program dari Dinas Kesehatan perlu ada upaya para pemangku kepentingan ini turut membantu

menjalankan program MGS ini. Hal ini dikatakan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh bahwa:

Bahwasannya untuk menyukseskan program ini (model gampong sehat) khususnya yang memiliki wewenang seperti walikota, anggota dewan sebagai mengawasi dan penganggaran, para kepala dinas terkait, para camat, Kapolsek serta Kodim dan kepala puskesmas sangat pengaruh dalam menjalankan program ini. Dengan demikian proses implementasi berjalan dengan baik tanpa ada hambatan walaupun ide ini dikeluarkan oleh dinas kesehatan pihak kami tidak bisa menjalankan program ini sendiri tanpa ada dukungan para pemangku kepentingan tersebut, karena merekalah yang tau permasalahan kultur dilapangan dan kami cuman memberi pengarahan saja.³²

Masyarakat sebagai faktor kunci dalam menyukseskan sebuah kebijakan tanpa ada dukungan dari masyarakat program ini tidak berjalan dengan semestinya sehingga peran masyarakat bisa perlu dibutuhkan dalam menjalankan program MGS. Hal ini diungkapkan Ketua Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa:

Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program MGS apabila masyarakat turut andil menjalankan sehingga bisa terdampak kedalam lingkungan masyarakat itu sendiri bahwasannya untuk menjaga kesehatan masyarakat bermula dari peran masyarakat itu sendiri kami sebagai pembina cuman kasih saran penting menjaga kesehatan.³³

Memang peran masyarakat sangat dibutuhkan masyarakat sebagai faktor utama harus dengan sukarela demi menjaga perilaku hidup sehat dan menjaga lingkungannya. Hal ini disampaikan oleh puskesmas dan Geuchik Lamgugop :

kami sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini program Model Gampong Sehat, dengan program ini bisa mencegah hal-hal munculnya penyakit terganggunya kesehatan masyarakat secara dilingkungan pemukiman Gampong apalagi program ini bermula dari

³² Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023

³³Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023

tingkat Gampong karena ditingkat Gamponglah perlu dicegah terlebih dahulu karena digampong masyarakat berinteraksi sosial, tempat tinggal dll. Apabila dengan telah terserang penyakit kesehatan dimasyarakat otomatis saat beraktifitas masyarakat bisa terhambat dengan adanya terserang penyakitn maka dengan itulah perlu adanya inovatif seperti MGS ini.³⁴

Hal senada diungkapkan tokoh masyarakat Gampong yang menyatakan bahwa :

Saya sebagai kaum muda sangat mendukung kebijakan pemerintah ini dengan adanya kebijakan tersebut bisa merubah gampong dengan hidup sehat apabila dalam lingkungan gampong sehat kita sebagai masyarakat yang mendiami lingkungan bisa menjadi nyaman dalam menjalani kehidupan.³⁵

4.3 Tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan Inovasi Model Gampong Sehat di Lamgugop.

Perlu ada pembenahan kesehatan di tingkat gampong secara perilaku dan lingkungan. Apabila digampong sudah mencapai kriteria diinginkan maka dalam bentuk kesehatan maka proses tindak lanjut perkembangan kesehatan bisa berdampak kelingkungan sekitar seperti dalam dunia politik, ekonomi maupun dalam dunia kerja serta sosial.

Kendala saat ini yang dialami oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan program MGS khususnya di Gampong Lamgugop, di sebabkan oleh banyaknya masyarakat/warga baru yang datang dari luar Kota Banda Aceh untuk

³⁴Wawancara dengan geuchik gampong Lamgugob Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Juni 2023

³⁵ Wawancara dengan masyarakat gampong Lamgogob Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023

menetap di Gampong tersebut yang secara tidak langsung dapat menyebabkan tidak terealisasinya indikator dari MGS. Sebagai contoh, banyak masyarakat yang datang dari luar Kota Banda Aceh yang masih belum mengetahui tentang aturan yang berlaku di Lamgugop Kota Banda Aceh, itu semua bisa dilihat banyaknya masyarakat luar Kota banda Aceh yang masih membakar sampah di pekarangan rumah, meludah sembarangan sangat mengendara, membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh:

Tantangan dan hambatannya ada di pelaksanaannya, tentu saja kita melaksanakan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi terkadang dilapangan ada saja masalahnya seperti banyaknya orang baru yang masuk di gampong tersebut, mereka belum mendapatkan sosialisasi terkait program ini, jadi programnya tidak berjalan maksimal dikalangan masyarakat, jadi perlu sosialisasi secara rutin dan berskala sebenarnya³⁶.

Penghambat lainnya dalam Implementasi Kebijakan Model Gampong Sehat di Gampong Lamgugop seperti sarana dan prasarana pendukung program tersebut yang masih belum dimanfaatkan dengan baik, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi pada program misalnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, kemudian dari segi pelaksana sendiri yaitu sosialisasi yang kurang menyeluruh ataupun menyentuh masyarakat karena sosialisasi yang dilaksanakan juga belum intensif dan hanya daerah daerah tertentu . Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Penghambatnya bisa kita lihat dari sarana dan prasarana pendukung program tersebut yang masih belum dimanfaatkan dengan baik, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi pada program misalnya dalam

³⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023

*menciptakan lingkungan yang bersih, kemudian dari segi pelaksana sendiri yaitu sosialisasi yang kurang menyeluruh ataupun menyentuh masyarakat karena sosialisasi yang dilaksanakan juga belum intensif dan hanya daerah daerah tertentu. Padahal untuk terealisasinya program ini tentunya harus ada saling peduli di masyarakat.*³⁷

Selain itu juga ditambahkan oleh Kepala Puskesmas Syiah Kuala bahwa pelaksanaan Gampong Sehat ini memang belum begitu optimal karena belum optimalnya pelibatan lintas kepentingan. Menurutnya pelibatan multipihak sangat membantu realisasi program ini.

*Sejauh ini pelaksanaannya masih belum optimal, jadi perlu melibatkan multi pihak untuk mengawal kebijakan ini agar pemerintah serius menerapkan kebijakan ini. Maka sangat diperlukan keterlibatan media dan jurnalis, agar beritanya terus tersebar di kalangan masyarakat.*³⁸

Selain itu juga bahwa kebijakan ini sudah lama hadir namun hingga penghujung tahun 2023 belum ada sosialisasi secara masif yang dilakukan pemerintah sehingga informasi tentang Gampong Sehat belum sampai ke masyarakat.

*Sampai penghujung 2022 dan sudah berjalan 2023 sosialisasinya belum massif jadi ini perlu pengawasan agar dilaksanakan secara nyata.*³⁹

Selain itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh juga menerangkan tantangan yang paling berat perihal lemahnya komitmen pemerintah Aceh dalam mewujudkan MGS. Ditegaskan, keberadaan Kebijakan sudah lama ini sama sekali belum berjalan efektif dan maksimal. Hal itu ditandai dengan masih bebasnya

³⁷ Wawancara dengan Kepala Puskesmas Syiah Kuala Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Juni 2023

³⁸ Wawancara dengan Kepala Puskesmas Syiah Kuala Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Juni 2023

³⁹ Wawancara dengan masyarakat gampong Lamgogob Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023

masyarakat membuang sampah sembarangan, sanitasi tidak baik jorok. Seharusnya, pemerintah yang menyiapkan solusi untuk hal-hal seperti ini, terutama pemerintah gampong.

Tantangannya masih lemahnya komitmen pemerintah dalam mewujudkan MGS ini. kebijakan yang sudah disahkan , sama sekali belum berjalan efektif dan maksimal. Hal itu ditandai dengan masih bebasnya masyarakat membuang sampah sembarangan, sanitasi tidak baik jorok. Seharusnya, pemerintah yang menyiapkan solusi untuk hal-hal seperti ini, terutama pemerintah gampong.⁴⁰

Fenomona seperti ini bisa menghambat pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerapkan kebijakan tentang MGS. Mengingat permasalahan Kota Banda Aceh secara umum banyak terjadi gejala demam berdarah, dan penyakit hal lainnya sehingga harus ada penanganan serius untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kota Banda Aceh dengan visinya yakni menciptakan Kota Madani oleh karena pedlu mewujudkan nilai-nilai kesehatan yang baik demi menciptakan kesehatan masyarakat hidup sehat. Adapun yang menjadi penghambat dalam menjalankan program MGS ini seperti halnya faktor politik seperti pergantian kepala desa kerana tidak terpilih dan meninggal maupun terjadi perubahan sumber daya manusia seperti mutasi para satuan kerja perangkat daerah (SKPD), mutasi camat. Sehingga berdampak kelangsungan perjalanan program MGS tersebut, solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan sosialisasi kembali kepada pejabat atau keuchik yang baru, hal ini mempengaruhi target waktu yang di rencanakan.

⁴⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Program Model Gampong Sehat merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi kabupaten atau kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dapat dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Ada beberapa strategi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembangunan Kesehatan Gampong dalam penerapan model gampong sehat seperti strategi persiapan dalam mengumpulkan data informasi tentang model gampong sehat sehingga dengan strategi tersebut bisa mengetahui model kebijakan yang terjadi permasalahan dilapangan guna menerapkan digampong serta kesiapan gampong tersebut dalam bentuk apapun perlu dilakukan apabila gampong tersebut terpilih sebagai gampong pembinaan dalam melaksanakan program model gampong sehat dan peran pemangku kepentingan dan masyarakat faktor terpenting dalam menyukseskan kebijakan MGS ini.

Sedangkan Kendala saat ini yang dialami oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan program MGS khususnya di Gampong Lamgugop, di sebabkan oleh banyaknya masyarakat/warga baru yang datang dari luar Kota Banda Aceh untuk menetap di Gampong tersebut yang secara tidak langsung dapat menyebabkan tidak temealisasinya indikator dari MGS. Sebagai contoh, banyak masyarakat yang datang dari luar Kota Banda Aceh yang masih belum mengetahui

tentang aturan yang berlaku di Lamgugop Kota Banda Aceh, itu semua bisa dilihat banyaknya masyarakat luar Kota banda Aceh yang masih membakar sampah di pekarangan rumah, meludah sembarangan sangat mengendara, membuang sampah tidak pada tempatnya. Penghambat lainnya dalam Implementasi Kebijakan Model Gampong Sehat di Gampong Lamgugop seperti sarana dan prasarana pendukung program tersebut yang masih belum dimanfaatkan dengan baik, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi pada program misalnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, kemudian dari segi pelaksana sendiri yaitu sosialisasi yang kurang menyeluruh ataupun menyentuh masyarakat karena sosialisasi yang dilaksanakan juga belum intensif dan hanya daerah daerah tertentu

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dikemukakan hasil yang dicapai dan ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dari hasil yang dicapai dalam penelitian ini, masih ada beberapa kekurangan menerapkan model gampong sehat. Adapun saran penulis terkait persoalan yang terjadi dilokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mampu dalam membangun pola pikir masyarakat secara bertahap sehingga masyarakat memunculkan kesadaran dalam menjaga kesehatan, perilaku sangat penting dalam membangun kesehatan dilingkungan dimana dia berada apabila perilaku yang bermoral dan beretika sehingga dalam menjaga tata krama kehidupan bisa lebih berakhlak apabila itu sudah terpenuhi otomatis apa yang dicita-citakan oleh

Pemerintah Kota yang menggerakkan sektor kesehatan berdasarkan nilai-nilai Islam sehingga untuk mencapai semua itu perlu ada kerjasama antar elemen masyarakat, LSM, Aparat Keamanan dan Aparatur Pemerintah maupun Gampong serta memperkuat regulasi disektor kesehatan sehingga dengan adanya regulasi itu bisa memperkuat dalam menerapkan model gampong sehat.

2. Pemerintah harus melakukan sosialisasi rutin dalam membangun perilaku masyarakat dan memberi pemahaman kegiatan hidup sehat dan implementasi kebijakan seluruh elemen sehingga masyarakat terkena dampak dalam menjaga kesehatan itu sendiri. Berhasil atau tidaknya sebuah program yang dilahirkan dari kebijakan tidak terlepasnya seluruh elemen SKDP terkait maupun masyarakat harus berkejasama demi menciptakan dunia kesehatan yang lebih baik apa yang diharapkan oleh pemerintah kota dalam visi menciptakan kota yang madani khususnya ditingkat Gampong yang berada dalam kawasan ibukota Provinsi Aceh yakni Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007),
- Firman Ilmi, Dahlan Dahlan dengan judul Kebijakan Pemerintah Banda Aceh Dalam Pembangunan Kesehatan Desa. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala 2017 Jurnal.
- Hasanuddin Nur dengan judul Implementasi Program Desa Sehat Di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa 2019. Jurnal
- Jeane Elisabeth Langkai, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang, Jawa Timur: CV Seribu Bintang, 2019),
- Johani Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2013
- Konsep Kebijakan Publik*, diakses di <http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/konsep-kebijakan-publik.html>, diakses pada 8 Agustus 2021
- Konsep Kebijakan Publik*, diakses di konsep-kebijakan-publik.html, diakses pada 8 Agustus 2021
- Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018,
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014),
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),
- Surahma Asti Mulasari dengan judul Membangun Kota Sehat (Healthy City) Menuju Indonesia Sehat Berkemajuan. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Surahma Asti Mulasari. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 2018
- Tirtayasa Serang, <http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/>, diakses pada 20 Agustus 2021

Firman Ilmi, Dahlan Dahlan dengan judul Kebijakan Pemerintah Banda Aceh Dalam Pembangunan Kesehatan Desa. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala 2017 Jurnal.

Hasanuddin Nur, Implementasi Program Desa Sehat Di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa 2019. Jurnal

Surahma Asti Mulasari, Membangun Kota Sehat (Healthy City) Menuju Indonesia Sehat Berkemajuan. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Surahma Asti Mulasari. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 2018 Skripsi

Jeane Elisabeth Langkai, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang, Jawa Timur: CV Seribu Bintang, 2019),

Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014),

Diakses melalui website resmi Gampong Lamgugob <http://lamgugob-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 20 Juni 2023

Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023

Wawancara dengan Kepala Puskesmas Syiah Kuala Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Juni 2023

Wawancara dengan geuchik gampong Lamgugob Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Juni 2023

Wawancara dengan masyarakat gampong Lamgugob Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023